



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
TAHUN 2019**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**

**JL. JEND SUDIRMAN NO. 19 TLP (0482)2425381
EMAIL : kopukm.sinjai@gmail.com
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam penyusunan LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

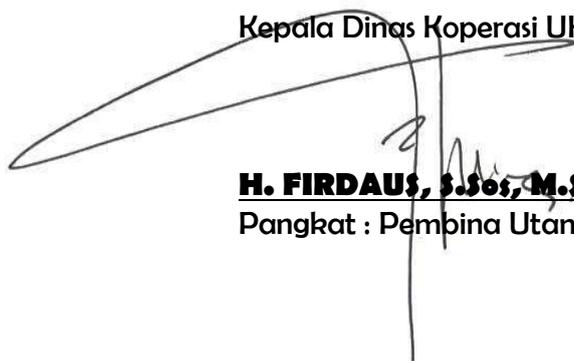
Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, kesemua indikator kinerja yang melampaui target. Dan terdapat 3 indikator sasaran lainnya dimana ketiga indikator yang telah memenuhi target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, 20 Februari 2020

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja



H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 tidak berhasil dicapai. IKU yang kinerjanya dibawah 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu : sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sasaran realisasinya 100%. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja di lingkungan pemerintah Kab. Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	lv
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Gambaran Umum Organisasi	7
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Gambaran Umum Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai	
2.2 Program untuk Pencapaian Sasaran	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
2.4 Indikator Kinerja Utama	19
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2019	
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Capaian Indikator Kinerja 2019	25
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
3.4 Realisasi Anggaran	
3.3 Analisa efisiensi	
BAB IV PENUTUP	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai

pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnyadua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 70 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah

2.Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 3.1. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - 3.2. Seksi Bina Usaha, Permodalan dan Pengembangan SDM Koperasi
 - 3.3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
4. Bidang UMKM, membawahi :
 - 4.1. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 4.2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan SDM UMKM
 - 4.3. Seksi Promosi
5. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 5.1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - 5.2. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
 - 5.3. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

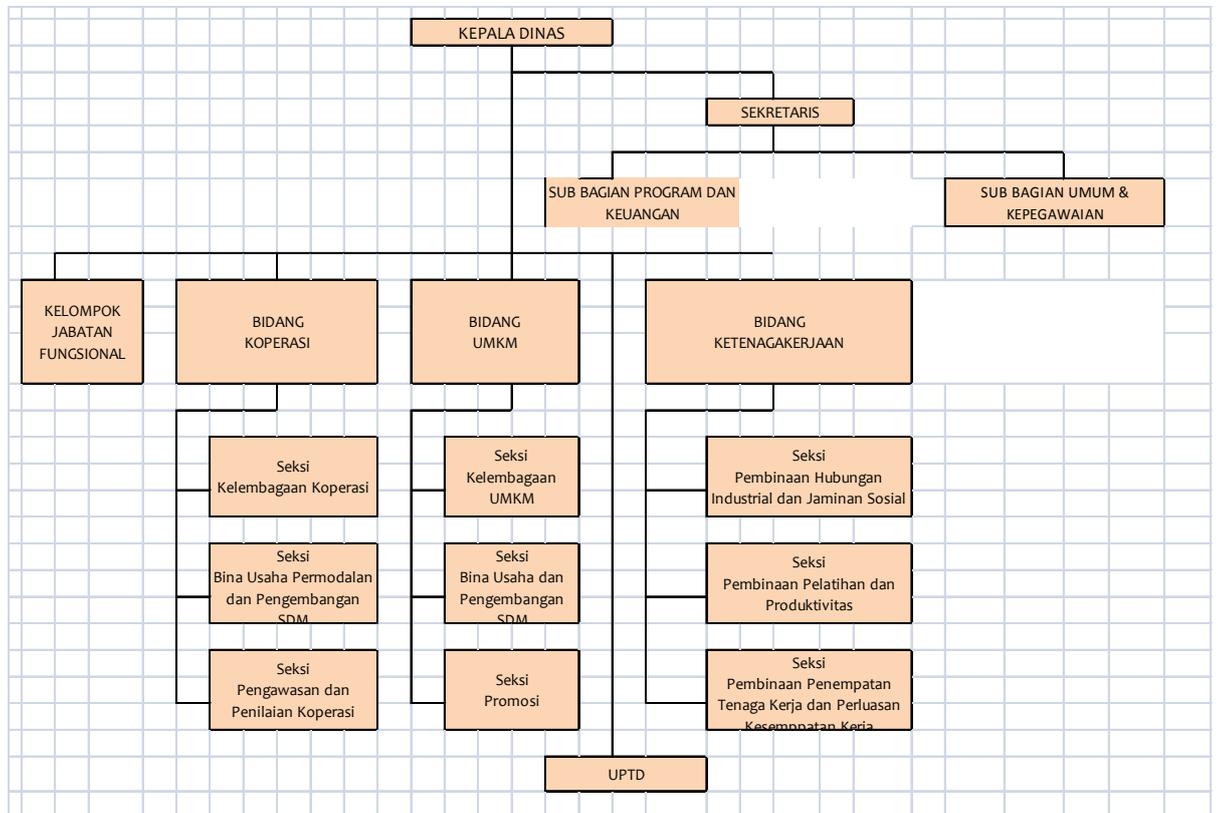
1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang dituangkan dalam Renja tahun 2019 adalah :

- a. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM;
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi;
- d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM;
- e. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
- f. Kurangnya inovasi produk ;
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM;
- h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
- i. Sarana dan prasarana dibidang Koperasi yang belum tersebar secara merata;
- j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan
- k. laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
- l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- m. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan sesuai TUPOKSI

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.6 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memiliki jumlah personil yang sangat minim. Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG KOPERASI		BIDANG UMKM		BIDANG TENAGA KERJA		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
III/a		2		1	-	-	-	-	-	3	3
III/b	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/c	1	2	1	1	-	3	2	1	5	7	12
III/d	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2
IV/a	-	-		1	-	-	-	-	-	1	1
IV/b		1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH	2	5	1	3	1	3	3	2	8	13	21
TOTAL	7		4		4		5				

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3

Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG KOPERASI		BIDANG UMKM		BIDANG TENAGA KERJA		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
\$ 2	2	2	-	1	-	2	-	-	2	5	7
\$ 1	-	3	2	2	1	1	1	2	4	8	12
\$MA	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2
\$MP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	5	2	3	1	3	3	2			21
TOTAL	7		5		4		5				

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Tabel 1.4
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Eselon	SEKRETARIAT		BIDANG KOPERASI		BIDANG UMKM		BIDANG FASILITASI, PEMBIAYAAN PROMOSI DAN SIMPAN PINJAM		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b	1		-	-	-	-	-	-	1	-	1
Eselon III/a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Eselon III/b	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	3
Eselon IV/a	1	2	2	1	-	3	2	1	5	7	12
TOTAL	5		4		4		4				

INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pendirian Klinik Koperasi dengan membuka konsultasi tentang perkoperasian, sehingga masyarakat bisa melaporkan pengaduan dan permintaan layanan perkoperasian dengan cukup mendatangi Sekretariat Klinik Koperasi yang berada di Bidang Kelembagaan Koperasi dan PPKL akan merespon permintaan layanan perkoperasian secepat mungkin .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

2.1.1 VISI DAN MISI BUPATI SINJAI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Bupati Sinjai yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Visi:		
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif		
Tujuan 1: Mewujudkan birokrasi yang baik	Sasaran 1: Terwujudnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi public ber-basis elektornik
Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis		

<p>Tujuan-2: Memenuhi standar minimal dasar dan pelayanan umum yang strategis</p>	<p>Sasaran-2: Terpenuhi standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar</p>	<p>Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dan SDM pelayanan secara beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan dasar secara seksama</p>
	<p>Sasaran-3: Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan</p>	<p>Mendorong daya tarik atas sejumlah layanan strategis secara ber sinergi dengan pengembangan destinasi wisata</p>
<p>Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat</p>		
<p>Tujuan-3: Meningkatkan pendapatan masyarakat</p>	<p>Sasaran-4: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu</p>	<p>Mendorong perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat bagi rakyat miskin</p>
	<p>Sasaran-5: Berkembangnya iklim usaha dan investasi</p>	<p>Memperbaiki pelayanan investasi secara ber-sinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM</p>
	<p>Sasaran-6: Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat</p>	<p>Menyediakan sarana/prasarana, fasilitas dan penyuluhan teknologi dalam peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan</p>
	<p>Sasaran-7: Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah</p>	<p>Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara proporsional dengan pemberian layanan dan fasilitas kepada sumber-sumber pendapatan tersebut</p>
<p>Misi-4:</p>		

<p>Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa</p>		
<p>Tujuan-4: Meningkatkan kualitas manusia</p>	<p>Sasaran-8: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan taraf kualitas lembaga pendidikan dan memberi bantuan pendidikan pascasarjana dan doktor serta dukungan pendidikan bagi siswa miskin</p>
	<p>Sasaran-9: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan</p>
	<p>Sasaran-10: Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan</p>	<p>Meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan</p>
	<p>Sasaran-11: Meningkatnya aktivitas keagamaan</p>	<p>Mengembangkan Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan</p>
<p>Misi-5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah</p>		
<p>Tujuan-5: Meningkatkan perkembangan wilayah</p>	<p>Sasaran-12: Berkembangnya aktivitas pada sarana/prasarana public kecamatan</p>	<p>Menyediakan sarana/prasarana dan ruang public sebagai pusat aktivitas tiap kecamatan</p>
	<p>Sasaran-13: Meningkatnya aksesibilitas</p>	<p>Membangun, memelihara dan meningkatkan jalan</p>

	wilayah	untuk konektivitas dan keterbukaan isolasi wilayah
	Sasaran-14: Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari	Membangun sarana/prasarana untuk suplai air minum secara mengelola sumber air minum
	Sasaran-15 Terpenuhinya sarana/pra-sarana perumahan dan pemukiman	Membangun sarana/prasarana lingkungan pemukiman dan sanitasi diiringi dengan perbaikan kelayakan huni rumah penduduk
Misi-6: Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.		
Tujuan-6: Meningkatkan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Sasaran-16: Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kapasitas Satpol PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman secara beriringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan
Misi : 7 Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.		
Tujuan-7: Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup	Sasaran-17: Terpeliharanya kebersihan, keindahan lingkungan hidup perkotaan dan sumberdaya alam serta	Menata taman kota dan RTH pada setiap kecamatan secara ber sinergi dengan pengelolaan sampah modern dan revitalisasi terumbu karang
	Sasaran-18: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Memetakan wilayah rawan bencana seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana

Keterkaitan Visi dan Misi Bupati

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja berada pada frase Mandiri dalam Visi Bupati Sinjai. Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan visi Bupati Sinjai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

Tabel Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan Visi Misi Bupati

Visi	:	Mandiri				
Misi III	:	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat				
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah kebijakan	
Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM	1.	Meningkatnya kualitas koperasi				
	2.	Meningkatnya kapasitas UMKM				
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	1.	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja				

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tujuan Dinas Koperasi UKM dan

Tenaga Kerja antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi aktif	kop	84	95
	Jumlah usaha mikro dan kecil	UMKM	25500	30600
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	393	780



SASARAN

- a. Meningkatnya kualitas koperasi
- b. Meningkatnya kapasitas UMKM
- c. Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kualitas koperasi	1. Persentase koperasi aktif	%	64,62	67,86
Meningkatnya kapasitas UMKM	1. Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	90,04	91,30
	2. Persentase BPR/LKM aktif	%	75,00	75,00
	3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	91,50	92,81
Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	%	7,39	3,33
	2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	60,00
	3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	93,79	98,11
	4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	13,81	16,47
	6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	85,71
	7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	55,56	80,00
	8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	65,45	76,19
	9. Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,95	8,33

2.3 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kualitas koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya kapasitas UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2019, IKU dan APBD. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	%	65,91
Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	90,29
	Persentase BPR/LKM aktif	%	
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	75,00
Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	%	8,00
	2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	50,00
	3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	93,85
	4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	14,29
	6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	62,50
	7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	57,14
	8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	66,67
	9. Rasio lulusan S1/S2/S3	%	8,03

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5
IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Persentase peningkatan koperasi aktif	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Bid koperasi
Persentase peningkatan usaha mikro kecil menengah	%	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil (n)}}{\text{Jumlah seluruh UKM (n-1)}} \times 100$	Bidang UMKM
Jumlah Tenaga kerja/Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan	orang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	Bidang Tenaga Kerja

2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.674.898.408 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Rencana Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
TA 2019

No	Uraian	Rencana(Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.398.610.934	56.41
2	Belanja Langsung	1.906.095.800	44.83
Jumlah		4.251.906.734	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2019

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	308.937.158	35,92
Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	219.732.862	25,55
	Persentase BPR/LKM aktif		
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		
Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	331.241.126	38,52
	2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		
	3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		

	4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek		
	5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		
	6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
	7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		
	8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan		
	9. Rasio lulusan S1/S2/S3		
TOTAL		859.911.146	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator yaitu : Persentase koperasi aktif dialokasikan anggaran sebesar Rp. 308.937.158,- atau dengan persentase sebesar 35,92 % dari Total keseluruhan jumlah pagu anggaran belanja langsung untuk melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan pendukung.

Sedangkan untuk mencapai Sasaran kedua Meningkatnya kapasitas UMKM anggaran sebesar Rp. 219.732,862,- atau dengan persentase 25,55 % dari total pagu anggaran belanja langsung untuk melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan.

Sasaran ketiga Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja yang mendapatkan pelatihan dengan anggaran Rp. 319.118.290 atau 38,52 % untuk melaksanakan program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 4 kegiatan pendukungnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
	< 50	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTR A (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase koperasi aktif	64,62	65,91	65,15	98,85	67,86	96,01

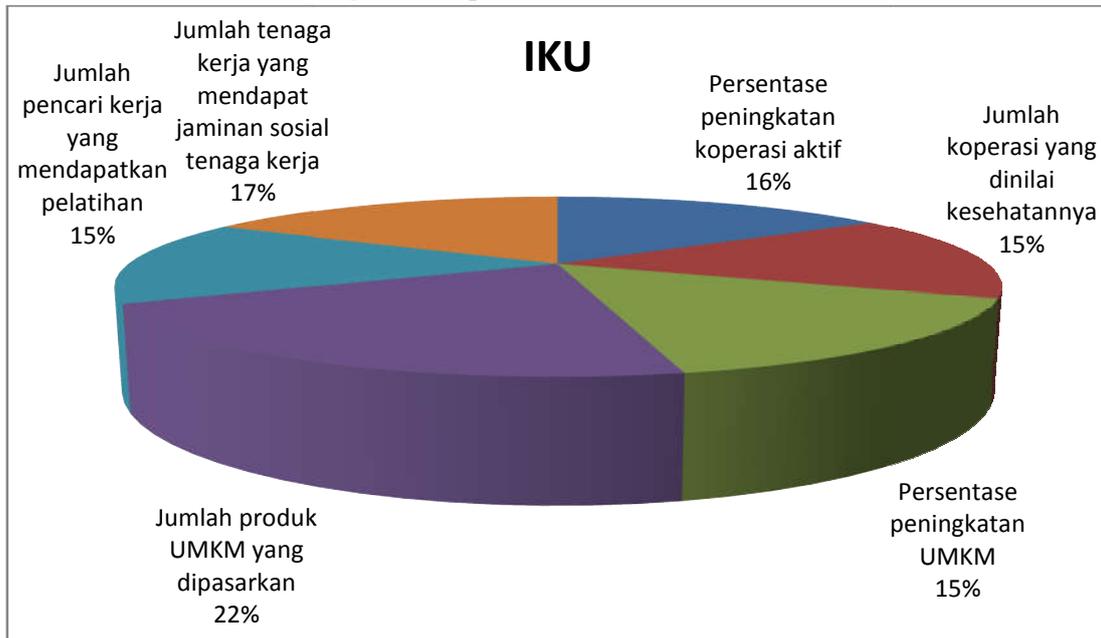
No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTR A (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap P 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	90,04	90,29	90,54	100	91,30	99,16
3.	Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	75,00	100	75,00	100
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	91,50	91,62	93,33	102	92,81	100
5.	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	7,39	8,00	00	00	3,33	00
6.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	50,00	00	00	00	00
7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,79	93,85	94,14	100	98,11	95,95
8	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	13,81	14,29	79,68	557	16,47	484
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	00	62,50	81,36	130	85,71	94,92
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	55,56	57,14	76,19	133	80,00	95,23
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	65,45	66,67	72,73	109	76,19	95,46

12	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,95	8,03			8,33	
----	------------------------	------	------	--	--	------	--

Dari 12 (*duabelas*) Indikator Kinerja Sasaran pada tahun 2019, 5 (lima) indikator menunjukkan capaian diatas 100%, dan 3 (tiga) indikator dibawah 100 %. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target target IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2019, masih diperlukan upaya keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukkan capaian **Sangat Tinggi**.

Grafik
Tingkat Capaian IKU Tahun 2019



PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 12

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2019 Banding 2018	Target (RENSTRA)	Capaian 2019 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	%	65,15	64,62	101	65,91	98,85
2	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	90,54	90,04	100	90,29	100

		Persentase BPR/LKM aktif	%	75,00	75,00	100	75,00	100
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	93,33	91,50	102	91,62	102
3	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	%	00	7,39	00	8,00	00
		2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	00	100	00	50,00	00
		3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	94,14	93,79	100	93,85	100
		4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	79,68	13,81	577	14,29	557
		5. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	00	00	00	00	00
		6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		81,36	00	00	62,50	130

		7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		76,19	55,56	137	57,14	133
		8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	72,73	65,45	111	66,67	109
		9. Rasio lulusan S1/S2/S3	%		7,95		8,03	

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas koperasi

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas koperasi maka didukung oleh indikator Persentase koperasi aktif

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas koperasi

No	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase koperasi aktif	64,62	65,91	65,15	98,85	67,86	96,01

Untuk tahun 2019, Persentase peningkatan koperasi aktif capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **(Tinggi)**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak

796,01 % dari target pada akhir RENSTRA (2023).

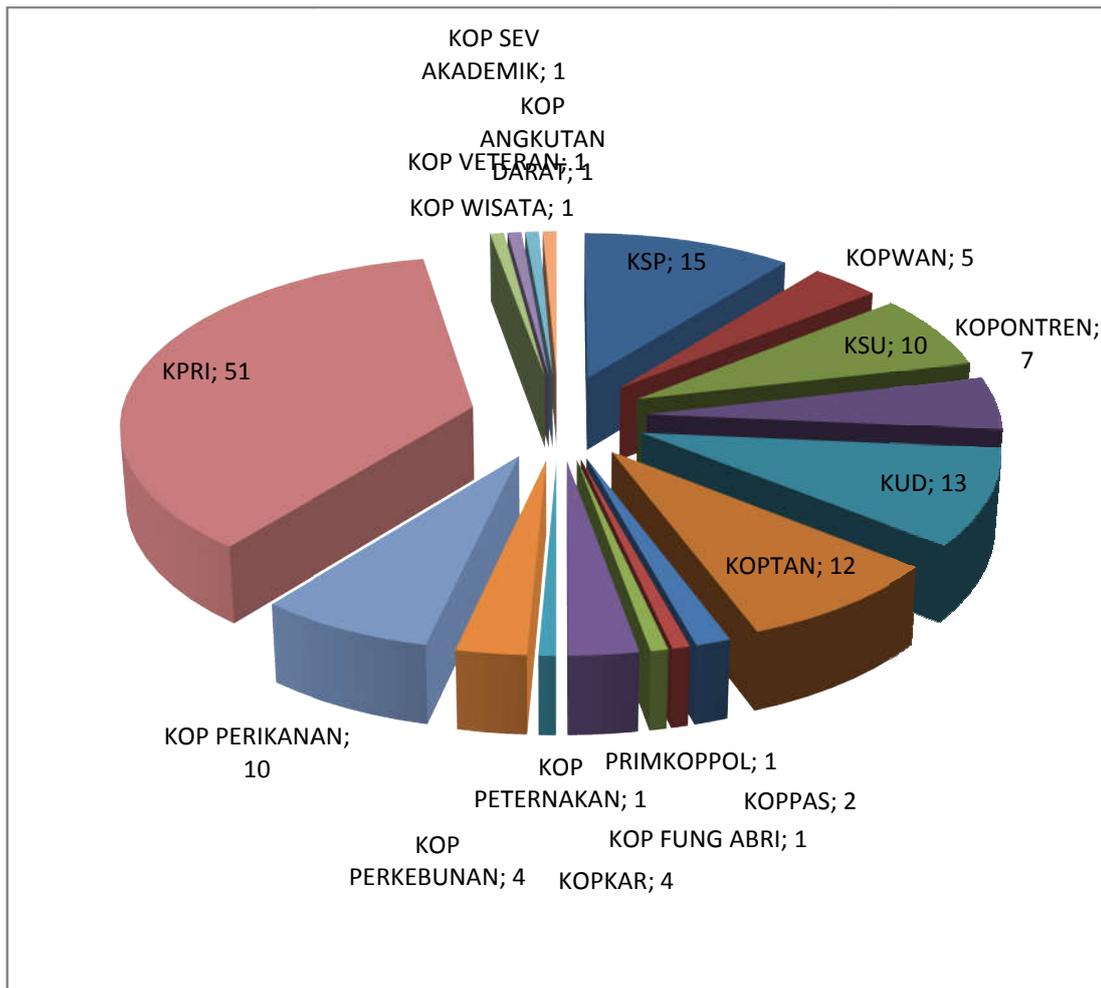
Dibandingkan realisasi tahun 2018 capaian persentase koperasi aktif meningkat ditahun 2019 hanya 65,15 %. hal ini disebabkan banyaknya koperasi yang RAT sehingga koperasi tersebut dinyatakan koperasi yang aktif.

Perkembangan koperasi sampai akhir tahun 2019 bisa dilihat dari segi jumlah tercatat sebanyak 132 unit. Dari 132 unit tersebut 86 unitnya berstatus koperasi aktif atau 65,15 % yang terealisasi dari target yang ditetapkan yaitu 65,91%.

Sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kantor koperasi;
2. Kegiatan koperasi masih berjalan;
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan

Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 adalah 132 koperasi yang terdiri dari beberapa jenis koperasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Adapun kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi tersebut adalah :

1. **Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi**
Pagu anggaran Rp. 31,860,423 dan terealisasi sebesar Rp. 31.853,933 atau 99,97 %
2. **Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam KSP/USP**
Pagu anggaran Rp. 13,232,348 dan terealisasi Rp. 13.198,598 atau 99,97 %
Jika tahun 2018 yang mendapatkan penilaian sebanyak 30 koperasi sedangkan tahun 2019 sebanyak koperasi.

Adapun kesehatan koperasi dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

- Aspek permodalan
- Aspek kualitas aktiva produktif
- Aspek efisiensi
- Aspek likuiditas

- Aspek kemandirian dan pertumbuhan
- Aspek jatidiri koperasi

Yang mana hasil penilaian kesehatan bagi koperasi untuk tahun 2019 ini sebanyak 30 koperasi dengan hasil sebagai berikut :

Koperasi sehat	: 2 koperasi
Koperasi cukup sehat	: 28 koperasi

3. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Koperasi
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.844.387 dan terealisasi Rp. 5.799.387 atau 99,23 %
4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi
Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 258.000.000 dan terealisasi Rp. 249.554.260 atau 96,72 %

a. Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi :

- Pemahaman Masyarakat tentang prinsip Perkoperasian masih rendah serta peran pemerintah ditingkat desa dan Kecamatan dalam mendorong pembinaan Koperasi masih rendah
- Masih kurangnya akses permodalan
- Kurangnya koperasi yang melaksanakan RAT sehingga yang dinilai juga berkurang
- Banyaknya koperasi yang tidak memisahkan laporan keuangan dari unit usahanya
- Kurangnya tenaga penilai yang memiliki sertifikat

b. Solusi :

- Peningkatan peran pemerintah beserta seluruh stakeholder dalam pembinaan Koperasi melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian secara Komprehensif.
- Dinas koperasi melakukan pembinaan berupa diklat, bimtek dan pendampingan koperasi
- Perlu adanya penambahan ASN yang berkualitas sesuai kompetensinya dibidang koperasi
- Melakukan temu kemitraan dengan lembaga keuangan.
- Melakukan pembinaan kepada koperasi sebelum RAT untuk memisahkan

laporan keuangannya atau neracanya.

- Mengikutsertakan pegawai dinas Koperasi dan UMKM pelatihan penilaian kesehatan koperasi di tingkat Propinsi

Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas/pertumbuhan UMKM

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2
Meningkatnya kapasitas UMKM

No	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	90,04	90,29	90,54	100	91,30	99,17
2.	Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	75,00	100	75,00	100
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	91,50	91,62	93,33	102	92,81	100

Untuk tahun 2019, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang (*Sangat Tinggi*), Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2023).

Capaian kinerja tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah mencapai 100 %.

- a. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018, dipengaruhi oleh pembinaan dan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh bidang UMKM beserta jajarannya. Untuk Tahun 2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebanyak 29,750 UMKM dari target yang ditetapkan 28,270 UMKM.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja **persentase**

peningkatan usaha mikro dan kecil antara lain :

❖ Faktor internal

- Tekad dan kemauan pelaku usaha dalam meningkatkan usaha semakin baik
- Kreatifitas dalam pengelolaan usaha semakin baik terbukti dengan tampilan kemasan dengan dan coraak yang menggambarkan usaha itu sendiri
- Penerapan tata kelola dalam hal pengelolaan usaha dilakukan secara tertib dan transparan

❖ Faktor eksteranl

- Adanya dukungan dari pemerintah dalam melalui penyediaan sarana dan prasarana serta permodalan dan pemberian izin usaha mikro kecil (IUMK) secara gratis
- Fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok wirausaha berbasis industri yang memiliki potensi dalam hal pengembangan usaha
- Pelaksanaan pendampingan bagi kelompok usaha

Adapun dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kegiatan Pendukungnya :

1. Pelatihan Kewirausahaan Muda Baru

Pagu anggaran Rp. 100.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 99,038,028 atau 99,03 %. Kegiatan ini merupakan DAK Non Fisik dengan melatih 120 UKM yang direkrut dari tiap desa. Tujuan daripada kegiatan pelatihan ini adalah menghasilkan UKM handal dalam bidang menjahit.

2. Perencanaan Koordinas dan Pengembangan UKMM

Pagu anggaran Rp. 59,667,012 dan terealisasi sebesar Rp. 48,798,442 atau 81,78 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah terdatanya semua UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai sehingga tersusun dalam bentuk dokumen.

3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM (Galery UMKM)
Pagu anggaran Rp. 26,838,350 dan terealisasi 100 %.
Capaian ini juga menyumbang sebanyak 45 produk atau 112,5 % untuk indikator jumlah produk UMKM yang difasilitasi pemasarannya.
4. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
Pagu anggaran Rp. 33,227,500 dan terealisasi 100 %.

a. **Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi :**

- Sinergitas Penyelenggaraan promosi produk Usaha mikro kecil dan menengah antara Organisasi perangkat daerah masih rendah dimana setiap instansi memiliki program masing masing dan berjalan secara sendiri sendiri
- Adanya kesulitan bahan baku sehingga produksi UMKM tidak kontinyu
- Sarana Pemasaran produk Usaha Mikro Melalui Galeri Koperasi dan UKM kab.Sinjai belum Terpublis dan tersosialisasi dengan baik di masyarakat sehingga masih banyak Pelaku UKM tidak menjadikan sarana ini sebagai wadah untuk Pengembangan Pemasaran hasil produk UKM

b. **Solusi :**

- Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro kecil dan menengah harus dilakukan secara terpadu antar instansi terkait.
- Mencari bahan baku pengganti yang lain sehingga ketersediaan produk tetap terjamin
- Sarana Pemasaran Produk UKM Perlu dipublikasikan serta disosialisasikan secara terpadu baik melalui media elektronik maupun melalui media mainstream sehingga optimalisasi fungsi galeri sebagai sarana pemasaran dapat diberdayakan

Sasaran 3 : Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja

**Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3
Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja**

No	Indikator	Capaian 2018	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	7,39	8,00	0,00	0	3,33	00
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	50,00	0,00	0	60,00	00
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,79	93,85	94,14	100	98,11	95,95
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	16,55	14,29	79,68	557	16,47	484
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	62,50	81,36	130	85,71	94,92

7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	55,56	57,14	76,19	133	80,00	95,24
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	65,45	66,67	72,73	109	76,19	95,46
9.	9. Rasio lulusan S1/S2/S3	7,95	8,03	0		8,33	

Untuk tahun 2019, capaian kinerja untuk beberapa indikator menunjukkan kinerja yang **bervariasi diantaranya :**

- Indikator Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun realisasinya tidak ada hal ini disebabkan karena tidak adanya sengketa yang terjadi antara pengusaha dan perusahaan.
- Indikator Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) realisasinya juga nol karena pada tahun 2019 tidak ada kasus yang terjadi pada perusahaan
- Indikator Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan teralisasi 100 % dimana pencari kerja yang terdaftar sebanyak 546 orang dan berhasil ditempatkan sebanyak 514 orang. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- Indikator Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek realisasinya 557 % dimana pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai peserta jamsostek 4.412 orang dari keseluruhan jumlah pekerja atau buruh yang ada dikabupaten Sinjai sebanyak 5.537 orang.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santuan berupa uang pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Penjaminan ini sangat penting bagi para pekerja/buruh sebagai upaya preventif bagi perlindungan diri sendiri maupun keluarganya.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Adapun kegiatan yang mendukung program dalam mencapai sasaran meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja adalah :

1. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja

Pagu anggaran Rp. 20.158.799 dan terealisasi Rp. 19,961,609,-

2. Pendataan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pagu anggaran Rp. 17.869,735 dan terealisasi Rp. 17.813,765 atau 99,69 %

3. Pelatihan Keterampilan Las Listrik

Pagu anggaran Rp. 61.025.967 dan terealisasi Rp. 60.983,350 atau 99,93 %.

4. Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri

Pagu anggaran Rp. 220.303.978 dan terealisasi Rp. 220.267.200 atau 99,98 %

Pelatihan calon anggota Polri diberikan kepada siswa-siswi tingkat akhir yang berprestasi yang direkrut di semua Sekolah Kabupaten Sinjai sebanyak 29 orang untuk menjadi anggota Polri sehingga nantinya siswa siswi yang telah mengikuti pelatihan dianggap cakap untuk mengikuti ujian selanjutnya dan tidak lagi canggung mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota Polri.

5. Pembinaan, Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan

Pagu anggaran Rp. 11.882,647 dan terealisasi Rp. 11.820.00 atau 99,47 %.

b. Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi :

- Kekurang sadaran pengusaha akan tanggungjawabnya dimana Undang-Undang tentang Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN) menyatakan semua masyarakat Indonesia wajib mengikuti program penjaminan sosial.
 - Kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja akan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja
- c. Solusi : pejabat fungsional mediator, dan fungsional pengawas ketenagakerjaan meningkatkan kinerjanya, yaitu melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan ketenagakerjaan,

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dari jumlah anggaran APBD (setelah perubahan) belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.906.095.800 terealisasi Rp. 1.872.428.374 atau 98,23 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, anggaran terbesar pada program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi pada sasaran Meningkatkan kualitas koperasi sebesar Rp. 258.000.000 dan terealisasi Rp. 249.554.260 atau 96,72 %. Sedangkan anggaran yang serapan terkecil pada sasaran meningkatnya kapasitas UMKM senilai Rp. 219.732.862 dan terealisasi Rp. 207.902.320 atau 94,61 %.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada

realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja, yang realisasi anggarannya mencapai 100 % namun realisasi kinerjanya baru mencapai 15 %. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas koperasi						
	Persentase koperasi aktif	65,91	65,15	98,85	308.937.158	300.406.178	97,24
2.	Meningkatnya kapasitas UMKM						
	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	90,29	90,54	100			
	Persentase BPR/LKM aktif	75,00	75,00	100			
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	91,62	93,33	102	219.732.862	207.902.320	94,61
3.	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja						

Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	8,00	0,00	0			
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50,00	0,00	0			
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	93,85	94,14	100	20.158.799	19.961.609	99,02
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	14,29	79,68	557	17.869.735	17.813.765	99,69
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	62,50	81,36	130	61.025.967	60.983.350	99,93
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	57,14	76,19	133	220.303.978	220.267.200	99,98
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	66,67	72,73	109	11.882.647	11.820.000	99,47

3.5 Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 3 (*tiga*) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatnya kapasitas UMKM, telah mencapai kinerja sebanyak 150 % dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %, dan juga terealisasi sebanyak 100 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran

publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi aktif	98,85	97,24	1,61
2	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	100	-	100
		Persentase BPR/LKM aktif	100	-	100
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	102	94,61	7,39
3	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing dipasar kerja	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun (%)	0	0	0
		2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	0
		3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100	99,02	0,31
		4. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	557	99,69	457
		6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	130	99,93	30,07

		7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	133	99,98	33,02
		8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	109	99,47	9,53

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 9 (sembilan) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga

Kerja sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2019

1. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi memperoleh Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Koperasi dan UKM atas jasa dan darma bakti memajukan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Program Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi memperoleh Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 yang diberikan kepada Koperasi KPRI Bina Sejahtera
3. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima Piagam Penghargaan atas Prestasi Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) selama Periode Tahun 2019 se Sulawesi Selatan



**KADIS KOPERASI MENERIMA PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI
DARI KEMENTERIAN KOPERASI**



Pemberian Penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi

Tingkat Propinsi



**Prestasi Kinerja Pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2019
se Sulawesi Selatan**

